

OMBUDSMAN SULSEL PANTAU KESIAPAN LAYANAN TRANSPORTASI JELANG MUDIK LEBARAN 2026

Senin, 09 Maret 2026 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

MAKASSAR - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan dan pemantauan langsung terhadap kesiapan layanan transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada 3-6 Maret 2026 dengan menyasar sejumlah simpul transportasi utama di Kota Makassar.

Pemantauan dilakukan dengan mengunjungi berbagai titik layanan transportasi, mulai dari terminal, pelabuhan, bandara, hingga posko pemantauan mudik dan posko kesehatan yang disiapkan oleh instansi terkait.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap kesiapan penyelenggara layanan publik dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik.

"Kegiatan pengawasan dan pemantauan langsung terhadap kesiapan layanan transportasi menjelang arus mudik Lebaran Tahun 2026. Pelaksanaannya juga memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah," ujar Ismu.

Ia menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan pada sarana dan prasarana transportasi, baik moda transportasi umum maupun simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, posko pemantauan mudik, hingga posko kesehatan.

"Dalam pemantauan ini, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan melihat langsung kondisi sarana dan prasarana layanan publik, kecukupan petugas, kecukupan serta kelayakan armada transportasi melalui ramp check, ketersediaan nomor pengaduan dan posko mudik, serta memastikan adanya akses layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan," jelasnya.

Dalam rangkaian pemantauan tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan juga melakukan kunjungan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Makassar yang turut dihadiri perwakilan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulsel.

Pada kesempatan itu, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain jalur landai (ramp), akses kursi roda, toilet difabel, ruang tunggu yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta kesiapan petugas dalam memberikan pendampingan bagi penumpang dengan kebutuhan khusus. Keberadaan fasilitas inklusif ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari kewajiban penyelenggara layanan publik untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan yang setara. Dengan demikian, penumpang dengan kebutuhan khusus tetap dapat melakukan perjalanan mudik secara aman dan nyaman.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan berharap para penyelenggara layanan transportasi dapat mengantisipasi berbagai potensi kendala sejak dini. Apabila ditemukan kekurangan dalam penyediaan layanan, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan mendorong agar segera dilakukan perbaikan melalui koordinasi dengan pihak terkait sehingga solusi dapat segera diambil.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan berharap pelaksanaan mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lancar, tertib, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.